

ANALISA

**MASALAH - MASALAH
INTERNASIONAL**

MODAL SEBAGAI FAKTOR KEKUATAN

TAHUN III NO. 5

MEI 1974



PENGANTAR PENERBIT

Dalam sistim ekonomi apapun, modal selalu memegang peranan yang penting dalam proses produksi. Peranan itu menjadi semakin lebih penting lagi dengan semakin panjangnya jalan produksi yang ditempuh atau, dengan perkataan lain, dengan semakin kapitalistisnya cara berproduksi yang dipilih.

Eila peranan modal diakui semakin penting, artinya dibenarkan penggunaan dan pemupukan modal yang semakin besar dalam proses produksi. Bila persoalan sudah sampai pada bidang pemupukan modal, ada tendens perhatian sudah tidak terbatas pada "output" saja, tetapi meluas ke bidang "pemilikan" modal. Artinya perhatian ekonomi meluas ke arah perhatian politik. Kedua analisa yang kami sajikan dalam penerbitan ini kiranya dapat diletakkan dalam rangka perkembangan fikiran yang baru kami sebutkan di atas.

Analisa yang pertama dibuat oleh Daoud JCESCEF. Di situ ia berusaha menunjukkan bahwa modal bukan hanya faktor produksi tetapi juga sumber kekuatan dan kekuasaan, betapa besarnya akibat yang mungkin kita alami bila tidak menyadari hal ini dan, karenanya, betapa perlunya diambil kebijaksanaan yang relevant untuk meniadakan akibat yang negatif dari pengikut-sertaan modal asing yang secara ekonomis memang diperlukan.

Analisa yang kedua dibuat oleh Pande RADJA SILALAH. Ia bertitik tolak pada kebijaksanaan Pemerintah yang pada pokoknya ingin mengadakan perimbangan dalam pemilikan modal pribumi dan non pribumi. Di situ ia berusaha mengajukan besarnya kepincangan yang harus ditutup dan cara bagaimana usaha mengoreksi kepincangan kuantitatif itu tanpa mengganggu perkembangan yang wajar dari pemupukan modal non pribumi yang memang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi swasta nasional.

DAFTAR ISI

Hal.

Pengantar Penerbit

i

Modal sebagai Faktor Produksi dan
Kekuatan

Daed JOESCEF

31

Perimbangan Modal Swasta Nasional di
Indonesia

Pande R. SILALAH

9



Diterbitkan oleh

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Tanah Abang III/27, Jakarta

MODAL SEBAGAI FAKTOR PRODUKSI DAN KEKUATAN

Daoud JCESOEF

Ilmu ekonomi, bahkan ajaran-ajaran konvensional mengenai ekonomi pembangunan, menganggap modal semata-mata sebagai faktor produksi dan bukan sebagai kekuatan. Kalaupun di situ dibahas sebagai kekuatan, kekuatan ini diartikan sebagai sumber yang menghasilkan produk dan bukan sebagai sumber yang menjurus ke arah kekuasaan.

Antara modal dan produk terdapat "capital-output ratio" atau COR sebagai penghubung kuantitatif, dalam artian: jumlah produksi adalah hasil dari jumlah modal dibagi oleh COR. Dengan perkataan lain, apabila COR sudah diketahui dan tingkat produksi yang dikehendaki, sektoral ataupun global, sudah ditetapkan, maka jumlah modal yang diperlukan dapat dihitung. Bila kemudian ternyata tabungan nasional tidak cukup besar untuk mendukung jumlah modal yang diperlukan itu, kekurangannya diisi dengan modal asing yang didatangkan dari luar negeri. Maka dipandang dari sudut ini jelas bahwa secara aritmetis modal asing adalah "pelengkap" semata-mata dan begini pulalah kiranya jalan pikiran rencana PELITA II. Berhubung ia hanya berfungsi sebagai pelengkap, untuk menghadapinya sudah cukup dengan usaha dan kebijaksanaan yang ditujukan ke arah pengembangan dunia usaha serta pembangunan industri nasional, melalui, antara lain, penyediaan dana kredit yang besar dan persyaratan pinjaman yang relatif ringan untuk pengusaha lemah.

Ilmu politik, sebaliknya, melihat modal sebagai kekuatan dan kekuasaan, melalui pengertian "ekonomi dominan", dan hal ini banyak sedikitnya sesuai dengan tanggapan instinktif yang hidup di kalangan rakyat biasa, terutama sejauh yang mengenai modal asing. Kalaupun ilmu ekonomi melihat modal sebagai faktor dan sumber produksi dan mengabaikan aspek kekuatan dan kekuasaan yang juga dikandungnya, hal itu bukanlah karena ilmu ini keliru. Pandangan yang demikian dipegang teguh semata-mata untuk menjaga kemurnian disiplinnya sendiri, yang jelas hendak dibedakan dari disiplin pengetahuan lainnya. Yang keliru adalah bila kita hendak memecahkan persoalan masyarakat yang

begitu kompleks melalui intellegensi rasionil dan ilmiah dari hanya satu disiplin, dalam hal ini ilmu ekonomi. Perbuatan yang demikian sempit dapat membawa akibat yang fatal, lebih-lebih karena ilmu ekonomi, sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, tidak mempunyai "laboratorium" di mana dapat ditest lebih dahulu pikiran dan formule deduktifnya sebelum ia diterapkan kepada realitas kehidupan masyarakat.

Kiranya perlu disadari bahwa begitu kita memutuskan modal dan investasi asing boleh masuk, kita sebenarnya mulai dari saat itu sudah merubah dimensi dan sifat ekonomi kita, terlepas dari soal apakah modal tersebut hanya polengkap atau tidak, juga terlepas dari soal apakah ia boleh diinvestir hanya di sektor tertentu dan sama sekali dilarang ditanam di bidang tertentu lainnya.

Dimensi ekonomi kita menjadi berubah karena dengan memberi izin modal asing untuk masuk, kita membuka ekonomi kita sehingga dunia usaha di mana bekerja pengusaha-pengusaha kita menjadi bertambah luas. Di dunia usaha yang bertambah luas itu mereka ini bertemu dengan lebih banyak usahawan asing, berhadapan dengan lebih banyak ragam berproduksi, lebih banyak cara memasarkan hasil produksi, tetapi dengan kondisi modal, teknik dan pengalaman yang tidak seimbang. Sifat ekonomi kita menjadi berubah karena dengan masuknya modal, ketrampilan teknis dan pengalaman asing itu ekonomi kita menjadi harus kompetitif, harus sanggup bersaing dengan ekonomi dan usaha yang datang dari luar. Dan bukan ini saja. Melalui masuknya modal dan investasi asing ini ekonomi kita menjadi berhadapan langsung tidak hanya dengan ekonomi asing yang immobil. Ia sebaliknya berhadapan dan terlibat dengan dunia usaha asing yang bergerak dengan ritme yang pesat sekali, terus menerus berubah, didorong dan dijiwai oleh suatu "romantisme teknologik". Hal ini mengakibatkan para pengusaha kita dengan lebih banyak ketidakpastian terutama sejauh yang mengenai tuntutan dan metode management industriil modern.

Apabila dimensi dan sifat dari hal yang dihadapi telah berubah, tentu hakikat persoalan yang berhubungan dengan hal tersebut menjadi berubah pula dan karenanya bentuk dan cara pemecahan yang dipikirkan mengenai persoalan tersebut seharusnya menjadi lain. Bukan lagi kredit, penyuluhan, bimbingan guna pengembangan dunia usaha dan pembangunan industri, dalam bentuk usaha meningkatkan kegiatan dunia usaha, meningkatkan peranan golongan ekonomi lemah dan mengembangkan kegiatan koperasi,

mengutamakan pengembangan usaha-usaha yang banyak menyerap tenaga dan meningkatkan penyebaran kegiatan usaha ke daerah-daerah, seperti yang dirumuskan oleh rencana PELITA II. Semua usaha-usaha tersebut memang diperlukan, tetapi titik berat perhatian dan usaha sudah tidak boleh di situ lagi. Titik berat kini harus dialihkan pada usaha perumusan kembali sistem kerja birokrasi-teknisi-pengusaha, bentuk, sistem dan mekanisme kerja lembaga-lembaga nasional, baik pemerintah maupun swasta, yang semuanya ditujukan ke arah menaikkan daya-bersaing dunia usaha dan industri nasional, baik bersaing di dalam maupun di luar negeri. Prestasi tidak lagi dinilai berdasarkan kuantitas produksi setiap bidang usaha dan sektor industri, tetapi berdasarkan resultat yang diperoleh di dalam berhadapan secara bersaing dengan dunia usaha dan industri asing, baik di dalam maupun di luar negeri.

Mungkin ada argumen yang mengatakan bahwa sebelum dipupuk untuk sanggup bersaing, adalah layak bila dunia usaha kita dibina dahulu untuk dapat berkembang. Jalan pikiran demikian menurut hemat kami tepat sebelum modal dan investasi asing diizinkan masuk ke dalam negeri. Sekarang ekonomi asing sudah ada dalam dunia usaha nasional, maka itu seharusnya sekaligus mengembangkan dan menaikkan daya bersaing dan dengan aksen pada usaha yang terakhir disebut itu. Harus diakui bahwa usaha menaikkan daya bersaing dunia usaha dan industri kita bukan soal yang sederhana. Setiap cabang usaha dan industri memerlukan cara dan perhatian yang tersendiri, yang secara khas berhubungan dengan situasi dan kondisi masing-masing yang unik. Maka itu untuk memikirkan cara menanggulangi persoalan ini kiranya perlu dibentuk satu komisi khusus, komisi modernisasi dunia usaha dan industri, yang anggotanya tidak hanya terdiri dari teoretisi yang berasal dari berbagai macam disiplin serta pejabat-pejabat dari berbagai departemen dan lembaga pemerintahan yang bersangkutan, tetapi juga para usahawan, karena mereka ini yang langsung merupakan pemain dan pemegang peranan; bila perlu dapat juga diikutsertakan usahawan asing yang sudah beroperasi di sini karena di antara mereka ini tidak jarang yang mempunyai iktikad baik, hanya kita saja yang tidak sanggup memanfaatkan pikiran dan pengalamannya. Hasil kerja komisi ini kelak seharusnya diserahkan kepada pemerintah untuk kemudian diolah dan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan nasional kita, sesedikitnya sebagai pedoman penuntun di dalam mempersiapkan perencanaan.

Adapun misi pokok komisi khusus itu sesedikitnya adalah seperti berikut: pertama, memikirkan cara bagaimana supaya pemerintah, melalui kebijaksanaannya, dapat menciptakan satu milieu ekonomi, sosial dan politik yang tidak hanya memungkinkan perkembangan industri tetapi lebih-lebih membuat transformasi yang diakibatkan perkembangan itu menjadi lebih dapat diterima oleh orang-orang yang tersangkut dan terkena; dalam rangka ini perhatian yang khusus harus diberikan kepada beberapa aksi tertentu seperti politik penempatan tenaga dan formasi professional, prasarana, riset industriil, penyuluhan ekonomi, dan lain-lain. Kemudian, memikirkan tindakan-tindakan langsung yang ditujukan guna mempercepat proses modernisasi sektor-sektor industri tertentu untuk mempermudah perubahan (conversion) yang hendak dijalankan oleh beberapa perusahaan dalam sektor industri tertentu. Selanjutnya, menggariskan "aturan bermain" yang diperlukan bagi perusahaan-perusahaan di dalam menjalankan fungsi produktifnya dengan seminimum mungkin hambatan birokratis dalam satu ekonomi dengan sistim pasar yang bersaing. Akhirnya, memikirkan cara mengembangkan dalam masyarakat sebagai keseluruhan satu mentalitas, satu spirit industriil, yang dalam dirinya mencerminkan pengertian dan kesadaran yang mendalam di kalangan para penanggung jawab dunia usaha, politik, pemerintahan, intelektual, tentang semua hal yang dituntut oleh pertumbuhan daya bersaing dari industri dan usaha nasional. Misi yang comprehensif seperti ini dimaksudkan supaya pertumbuhan dunia usaha dan industri nasional kelak tidak lagi merupakan satu faktor ketidakpastian berhubung ia adalah hasil dari kebijaksanaan parsial yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi satu faktor kebanggaan nasional berhubung ia adalah hasil dari suatu keseluruhan kebijaksanaan yang baik tujuan maupun alatnya ditetapkan secara konsisten.

Sebagai penutup kiranya perlu disimpulkan bahwa modal asing diperlukan untuk membangun ekonomi nasional. Walaupun secara aritmetis modal tersebut dapat dianggap sebagai hanya "pelengkap", tidak boleh dilupakan bahwa ia tetap merupakan satu "kekuatan". Namun begitu terhadap kekuatan itu kita tidak perlu takut dan menutup diri seperti siput yang masuk ke dalam rumah-kerangnya; yang kita perlukan adalah persiapan-persiapan yang tepat, bila tidak kita akan mengalami akibat-akibat yang fatal. Memikirkan persiapan-persiapan tersebut terang bukan pekerjaan yang sederhana, maka itu perlu dibentuk satu komisi khusus yang berdasarkan missinya dapat disebut sebagai "komisi

modernisasi dunia usaha dan industri". Adapun missi pokoknya bukanlah mengembangkan dunia usaha dan industri tetapi memperkuat daya bersaing dunia usaha dan industri nasional. Sebenarnya komisi seperti ini seharusnya sudah dibentuk dahulu pada saat kita memutuskan untuk mengizinkan pemasukan modal asing, yaitu pada saat diundangkannya undang-undang PMA. Namun belum terlambat bila dilihat dari sudut Repelita III di mana pembangunan sektor industri akan ditujukan pada usaha meningkatkan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi; bila demikian pada saat itu kelak pasti sudah diperlukan sekali adanya kekuatan bersaing yang riil dari dunia usaha dan industri kita, baik di dalam maupun di luar negeri, baik di antara sesamanya maupun terhadap asing.

PERIMBANGAN MODAL SWASTA NASIONAL DI INDONESIA

Pande R. SILALAH

Pendahuluan

Salah satu dari kebijaksanaan pemerintah yang diumumkan pada tanggal 22 Januari 1974 adalah usaha untuk menciptakan adanya perimbangan modal (saham) antara golongan pribumi dan non pribumi.

Pada hakikatnya usaha ini bertujuan, agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh segala lapisan masyarakat secara merata dan menghilangkan jurang pemisah antara golongan minoritas yang menguasai sebagian besar perekonomian dengan golongan mayoritas yang hanya menguasai sebagian kecil dari perekonomian Indonesia.

Penguasaan minoritas seperti tersebut di atas jelas merupakan keadaan yang tidak baik yang akan berakibat buruk terhadap keadaan sosial, ekonomi dan politik daripada masyarakat.

Usaha untuk menciptakan perimbangan seperti yang diinginkan, tentu harus melalui suatu proses dan hanya dapat dengan adanya suatu usaha. Bagaimana hasil usaha itu dapat dicapai, cepat atau lambat tergantung dari bentuk usaha yang dilakukan, tergantung dari besar kecilnya usaha yang dilakukan, tergantung dari perimbangan yang diharapkan dan tergantung dari keadaan yang akan diroboh itu sendiri. Tetapi yang tidak dapat diabaikan dan dilepaskan, usaha itu harus dilaksanakan secara "wajar".

Analisa yang disajikan dalam tulisan ini mencoba memberi suatu pedoman bagi usaha menciptakan perimbangan modal yang ada dalam golongan masyarakat Indonesia tanpa mengabaikan perkembangan yang wajar dari modal tersebut. Dari banyak tulisan-tulisan yang dapat dikatakan bertujuan sama terlihat bahwa analisisnya lebih menitik-beratkan segi kualitatif, sehingga untuk melengkapi keadaan tersebut tulisan ini sedikit banyak lebih menekankan segi kuantitatifnya.

Penggolongan modal menurut pemilikannya, sebenarnya tidak hanya dapat digolongkan menurut golongan pribumi dan non pribumi. Penggolongan dapat saja dilakukan menurut golongan suku yang ada dalam masyarakat Indonesia apakah itu golongan Jawa, Batak, Sunda, Minang dan lain sebagainya. Tetapi kenyataan karena golongan minoritas yang menguasai sebagian besar perekonomian Indonesia adalah golongan non pribumi, maka penggolongan tersebut untuk analisa dapat diterima dan analisa selanjutnya sesuai dengan penggolongan yang demikian.

Mengukur kekuatan masing-masing golongan sangat penting sebagai titik tolak dalam menentukan bagaimana dan sejauh mana usaha yang akan dilakukan untuk menciptakan perimbangan modal dari masing-masing golongan.

I. Kekuatan Modal Pribumi dan Non Pribumi

Mengukur kekuatan modal pribumi dan non pribumi dalam angka-angka secara tepat dan teliti kiranya tidak dapat dilakukan pada saat ini, karena kenyataan, data mengenai hal tersebut sangat sulit untuk diperoleh walaupun ada. Untuk keperluan analisa gambaran kekuatan modal pribumi dan non pribumi diambil dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), yang kiranya diharapkan dapat memberi gambaran yang mendekati keadaan yang sebenarnya.

Sebagai titik tolak diambil jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing sampai akhir bulan Maret 1974.

1. Jumlah Penanaman Modal Asing sampai akhir-bulan Maret 1974 sebesar US\$ 3.261,2 juta¹. Partnership rata-rata kira-kira 6% dari jumlah penanaman modal.
2. Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri sampai akhir bulan Maret 1974 sebesar Rp. 1.317.327 juta².
3. Kira-kira 80% dari proyek Penanaman Modal Dalam Negeri mendapat kredit investasi.

¹Business News, 1 Mei 1974, hal. 10

²Business News, 22 April 1974, hal. 9

4. Perbandingan antara modal pribumi dan non pribumi baik dalam Penanaman Modal Asing maupun dalam Penanaman Modal Dalam Negeri kira-kira 25 : 75.
5. Kredit investasi untuk PMDN yang termasuk proyek prioritas sebesar 75% dari penanaman modal dan untuk proyek non prioritas sebesar 50% dari penanaman modal. Diperkirakan 50% termasuk proyek prioritas dan 50% non prioritas.

Dengan demikian, besarnya modal pribumi dan non pribumi adalah sebagai berikut:

Pribumi

- a. Dalam PMA = $6/100 \times 1/4 \times 3.261,2 \text{ juta} \times 415 \text{ (koers 415)}$
= Rp. 20.300,97 juta.
 - b. Dalam PMDN = $\{(20/100 \times 1/4) + (80/100 \times 1/2 \times 1/4 \times 1/4) + (80/100 \times 1/2 \times 1/2 \times 1/4)\} \times \text{Rp } 1.317.327 \text{ juta}$
= Rp. 164.665,875 juta
- Total modal pribumi = Rp. 184.966,845 juta
=====

Non Pribumi

- a. Dalam PMA = $(6/100 \times 3/4) \times 3.261,2 \text{ juta} \times 415 \text{ (koers 415)}$
= Rp. 60.902,91 juta
 - b. Dalam PMDN = $(20/100 \times 3/4) + (80/100 \times 1/2 \times 1/4 \times 3/4) + (80/100 \times 1/2 \times 1/2 \times 3/4) \times \text{Rp } 1.317.327 \text{ juta}$
= Rp. 493.997,625 juta.
- Total modal non pribumi = Rp. 554.900,535 juta
=====

Eertitik tolak dari jumlah modal pribumi sebesar Rp. 184.996,845 juta dan modal non pribumi sebesar Rp. 554.900,535 juta, selanjutnya akan diperlihatkan bagaimana perkembangan dari masing-masing modal tersebut.

II. Perkembangan Modal Pribumi dan Non Pribumi

Untuk memberi gambaran mengenai bagaimana perkembangan kedua kekuatan modal tersebut secara wajar dianggap bahwa

tingkat perkembangan modal tersebut setiap tahun adalah 10% dari jumlah penanaman modal¹.

Dengan demikian akan terlihat bagaimana perkembangan kedua modal tersebut dalam 10 tahun mendatang seperti diperlihatkan dalam tabel I dan secara grafis tabel tersebut digambarkan dalam grafik I.

Dari grafik I akan terlihat dalam keadaan yang wajar sesuai dengan asumsi di atas, perkembangan modal non pribumi lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan modal pribumi. Dengan demikian selisih antara kedua modal tersebut makin lama makin membesar dan dengan perkataan lain, jurang antara pemilikan modal non pribumi dan pribumi makin lama makin besar. Jika dalam tahun 1974 selisih antara modal non pribumi dan pribumi masih kira-kira sebesar 370 milyar rupiah dalam tahun 1984 atau akhir Repelita II selisih tersebut sudah mencapai 959,68 milyar rupiah atau bila dinyatakan dengan prosentase terdapat kenaikan kira-kira 259,1%.

Keadaan perkembangan sebaliknya akan terlihat pada perkembangan penduduk dari kedua golongan, bila dianggap pertambahan penduduk bagi kedua golongan adalah sama dengan kenyataan penduduk yang digolongkan non pribumi pada saat sekarang ini hanya mencapai jumlah kira-kira 2 juta orang.

Jumlah-jumlah yang tertera dalam kolom terakhir Tabel I (selisih modal non pribumi dan pribumi), merupakan jumlah-jumlah dana yang perlu ditambah untuk dapat menciptakan kekuatan yang sama antara kedua golongan modal (sesuai dengan tahun penambahan dan anggapan bahwa dana tersebut menghasilkan untuk satu tahun kemudian). Jumlah dana yang perlu disediakan ini akan semakin besar bila perimbangan yang dimaksudkan adalah modal pribumi lebih besar dari modal non pribumi.

Mungkin dapat dikatakan, pemerintah perlu menyediakan dana tersebut agar perimbangan dapat tercapai. Tetapi akan timbul pertanyaan, apakah penyediaan dana sebanyak (tergantung waktu dan perimbangan yang diharapkan) itu akan diberikan secara

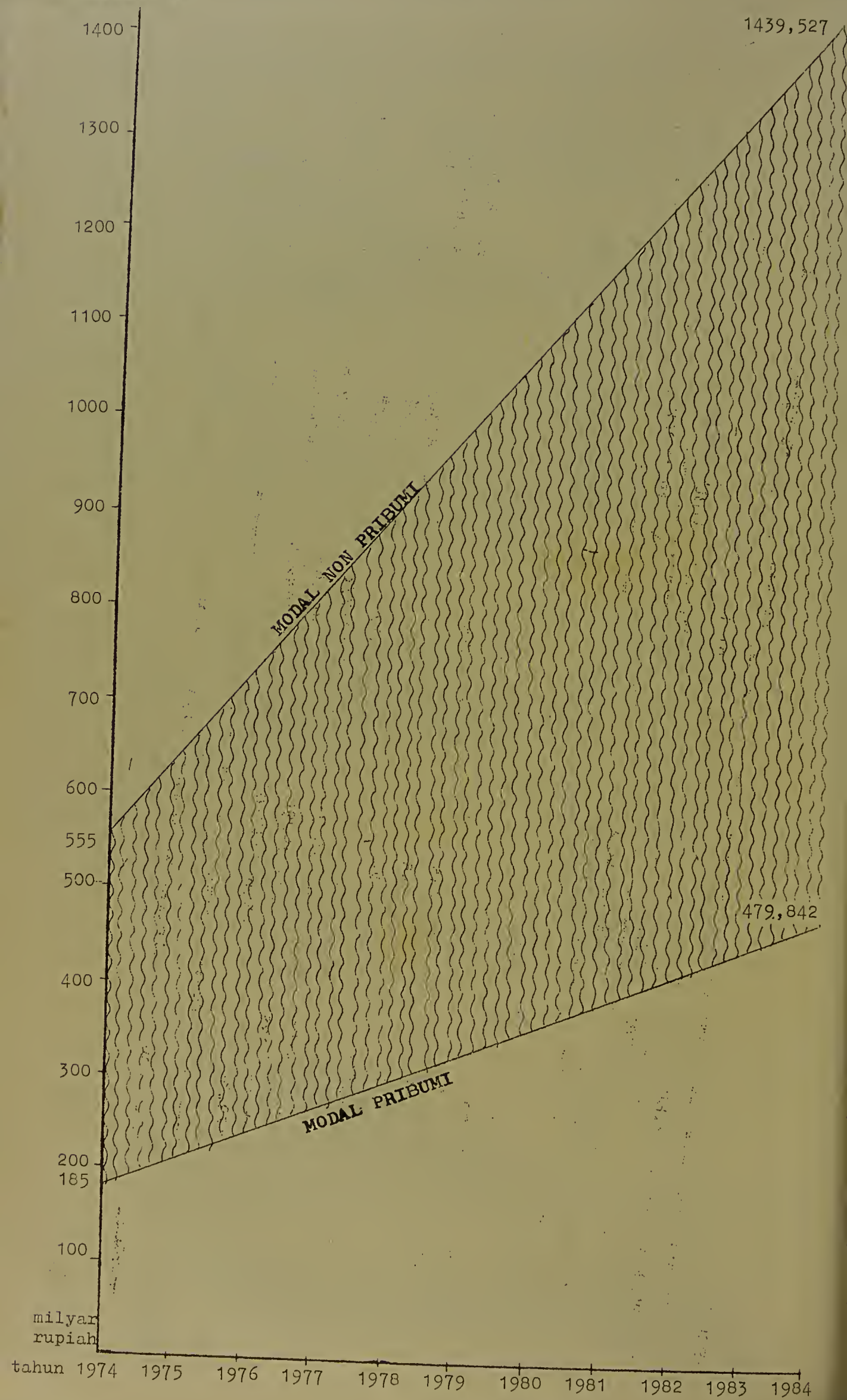
¹ Tingkat perkembangan 10% diambil berdasarkan asumsi: 1) tingkat laba bebas pajak sebesar 20% dari besarnya penanaman modal dengan perhitungan bahwa angka ini (20%) harus lebih besar dari tingkat bunga deposito; 2) 50% dari laba bebas pajak diperuntukkan bagi ekspansi atau re-investasi oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terikat pada pinjaman (bank) atau digunakan untuk pelunasan kredit oleh perusahaan-perusahaan yang masih terikat dengan pinjaman (bank); 3) baik pengusaha pribumi maupun pengusaha non pribumi mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh tingkat laba bebas pajak sebesar 20%.

TABEL I

PERKEMBANGAN MODAL PRIBUMI DAN NON PRIBUMI (dalam milyar rupiah)

Akhir Bulan	MODAL PRIBUMI		MODAL NON PRIBUMI		Salah Modal	
	JUMLAH	PERTAMBAHAN	JUMLAH	PERTAMBAHAN	Non Pribumi dan Pribumi	
Maret						
1974	185		555		370	
1975	203,5	18,5	610,5	55,5	407	
1976	223,85	20,35	671,55	61,05	447,70	
1977	246,235	22,385	738,705	67,155	492,670	
1978	270,8585	24,6235	812,5755	73,8705	541,7170	
1979	297,94435	27,08585	893,83305	81,25755	595,88870	
1980	327,738785	29,794435	983,216355	89,383305	655,477570	
1981	360,5126635	32,7738785	1.081,5379805	98,3216355	721,0253170	
1982	396,56392985	36,05126635	1.189,69177855	108,15379805	793,12784870	
1983	436,220322835	39,656392985	1.308,660956405	118,969177855	872,440633570	
1984	479,8423551185	43,6220322835	1.439,5270520455	130,8660956405	959,6846969270	

Keterangan: Modal tahun 1974 dibulatkan sampai milyar rupiah



cuma-cuma (subsidi) dalam bentuk saham kepada masyarakat atau, dana itu disediakan untuk membeli saham-saham perusahaan non pribumi dan seterusnya dijual kembali kepada golongan pribumi?

Bila hal yang pertama yang menjadi tujuan dari penyediaan dana maka akan tercipta perimbangan kekuatan modal. Tetapi yang dimaksudkan kiranya tidak demikian karena hal itu akan sangat sulit dilaksanakan. Masalah siapa yang akan diberi dan tidak jelas merupakan masalah yang pelik, belum lagi jika ditinjau dari segi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan tindakan yang demikian.

Bila hal yang terakhir yang dimaksudkan, masalahnya akan lain. Kalau hal itu yang dimaksudkan, maka pemerintah sebenarnya "tidak menciptakan perimbangan modal dalam arti yang sebenarnya". Karena dalam hal ini pemerintah hanya berfungsi sebagai alat perantara untuk menciptakan adanya perimbangan saham (modal). Masalahnya akan tetap sama bahwa perimbangan modal akan tercapai bila memang secara riil kekuatan modal masyarakat pribumi dapat diperbesar.

Sebagai bahan pemikiran ada baiknya melihat rencana investasi yang diharapkan dari sektor non pemerintah dan besarnya tabungan masyarakat dalam Pelita II seperti terlihat dalam tabel II di bawah ini.

TABEL II (dalam milyar rupiah)

	74/75	75/76	76/77	77/78	78/79	Jumlah
1. Investasi lain-lain	827,5	982,2	1.204,6	1.440,5	1.709,8	6.164,6
2. Tabungan masyarakat	479,8	540,6	743,9	954,6	1.267,4	3.986,2
3. Prosentase	58%	55%	62%	66%	74%	65%

Catatan: 1. diambil dari tabel 6-3 Repelita II
 2. diambil dari tabel 6-4 Repelita II
 3. Tabungan masyarakat dinyatakan dengan prosentase terhadap investasi lain-lain.

Dari tabel II di atas akan terlihat, jika seandainya seluruh tabungan masyarakat diperuntukkan untuk investasi lain-lain (non pemerintah), jumlah tersebut masih belum mencukupi dan perlu ditambah. Penambahan dalam hal ini dapat bersumber pada Penanaman Modal Asing yang jumlahnya secara prosentuil makin lama makin kecil.

Tetapi dalam hubungan dengan usaha menciptakan perimbangan saham (modal) tetap akan menjadi pertanyaan bagaimana perimbangan pemilikan antara golongan pribumi dan non pribumi dalam tabungan masyarakat tersebut. Bila perbandingan pemilikan dalam tabungan masyarakat itu juga kira-kira 25 untuk pribumi dan 75 untuk non pribumi dapat diperkirakan selisih antara modal non pribumi dan pribumi akan semakin besar dan akan lebih membesar sesuai dengan proses waktu. Kiranya hal ini perlu mendapat perhatian dalam usaha menciptakan perimbangan saham (modal) seperti apa yang diinginkan.

III. Mewujudkan Perimbangan

Bila dilihat kembali selisih antara modal non pribumi dan pribumi seperti yang diperlihatkan dalam tabel I dan grafik I, maka untuk menciptakan perimbangan selisih tersebut harus dihilangkan. Beberapa cara dapat ditempuh untuk maksud ini yaitu:

1. Menekan perkembangan modal non pribumi dan membiarkan modal pribumi berkembang secara wajar (lihat asumsi terdahulu).
2. Memberi kesempatan berkembang bagi modal non pribumi secara wajar dan mengusahakan perkembangan modal pribumi di atas perkembangan yang wajar.
3. Menekan perkembangan modal baik pribumi maupun non pribumi dengan tingkat penekanan yang lebih besar bagi modal non pribumi.

Dari ketiga alternatif ini maka alternatif pertama tidak tepat dilaksanakan karena akan menimbulkan dana-dana yang tidak dipergunakan oleh/pada non pribumi yang mempunyai akibat lanjutan. Adanya uang panas (hot money) pada masyarakat yang dapat mengganggu stabilisasi ekonomi, larinya modal ke luar negeri dengan kemungkinan akan masuk kembali ke dalam negeri dan dapat merusak pola perdagangan maupun ekonomi pada umumnya. Dan paling penting tindakan semacam ini jelas bukan tindakan yang wajar. Demikian juga dengan alternatif yang ketiga, jelas tidak seorangpun yang menginginkan pelaksanaan berdasarkan hal ini. Dengan demikian kiranya alternatif kedua adalah yang paling tepat untuk dilaksanakan.

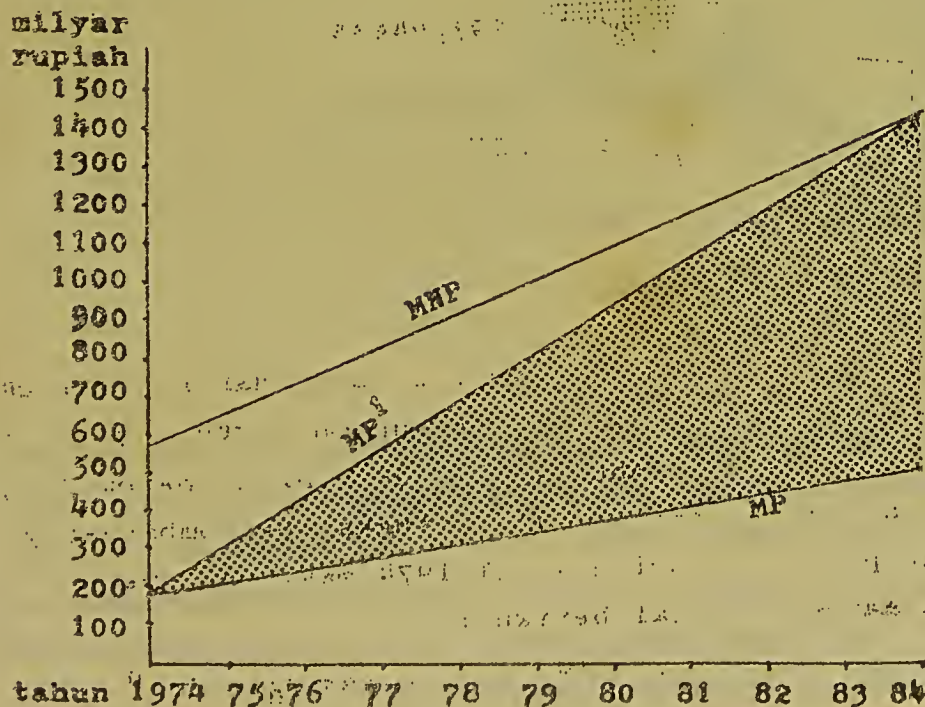
yaitu mengusahakan perkembangan modal pribumi lebih cepat dari perkembangan modal non pribumi dalam kondisi yang wajar. Dengan perkataan lain mengusahakan adanya percepatan yang lebih besar bagi modal pribumi. Besarnya perbedaan percepatan antara kedua modal tersebut akan menentukan waktu (lamanya) yang dibutuhkan untuk menciptakan perimbangan seperti apa yang dimaksudkan. Berdasarkan angka-angka dalam tabel 1 maka:

1. Seandainya diinginkan kekuatan modal pribumi dan non pribumi dalam 10 tahun mendatang sudah harus berimbang (50 : 50), dan usaha percepatan (di atas tingkat yang wajar) diberikan pada permulaan bulan April 1974 maka faktor percepatan yang harus diberikan atau diusahakan adalah sebagai berikut:

$$555 (1,1)^{10} = 185 (1 + N)^{10}$$

Perkembangan yang harus diusahakan bagi modal pribumi adalah sebesar N , yang dalam hal ini adalah sebesar 0,228. Dengan demikian percepatan yang harus diusahakan di atas tingkat perkembangan yang wajar adalah sebesar 12,8% ($0,228 \div 0,1$). Secara grafis dapat digambarkan seperti grafik di bawah ini.

GRAFIK II



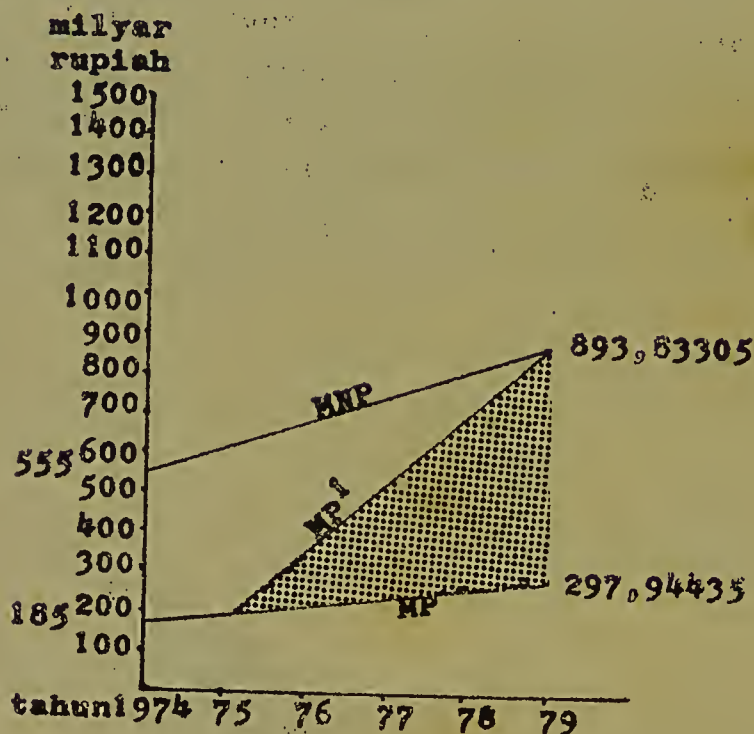
Keterangan: MP = modal pribumi tanpa percepatan tambahan
 MP1 = modal pribumi dengan penambahan faktor percepatan
 MNP = modal non pribumi

2. Seandainya diinginkan perbandingan antara modal pribumi dan modal non pribumi dalam 5 tahun mendatang sudah harus berimbang (50 : 50) dan usaha percepatan (di atas tingkat yang wajar) diberikan pada awal bulan April 1975 maka faktor percepatan yang harus diberikan atau diusahakan adalah sebagai berikut:

$$610,5 (1,1)^4 = 203 (1 + N)^4$$

Perkembangan yang harus diusahakan bagi modal pribumi adalah sebesar N, dan dalam hal ini adalah sebesar 0,447. Dengan demikian percepatan yang harus diusahakan di atas tingkat perkembangan yang wajar adalah sebesar 34,7% (0,447 - 0,1). Secara grafis digambarkan seperti di bawah ini.

GRAFIK III



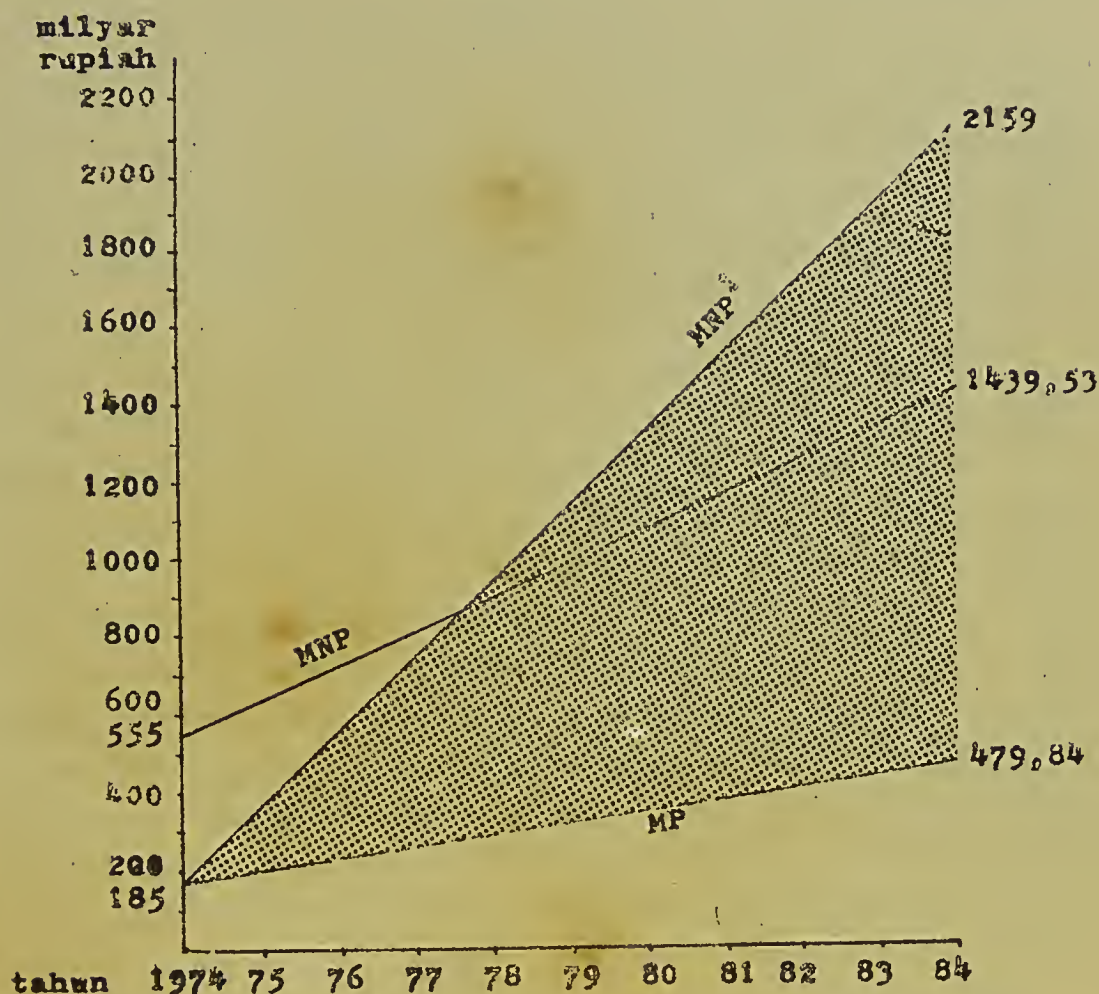
3. Seandainya diinginkan kekuatan modal pribumi dan non pribumi dalam 10 tahun mendatang (dasar perhitungan waktu bagi ketiganya adalah awal bulan April tahun 1974) sudah harus berbanding 100 : 50 dan usaha percepatan (di atas tingkat perkembangan yang wajar) diberikan pada awal bulan April 1974 maka percepatan yang harus diberikan adalah sebagai berikut:

$$555 (1,1)^{10} \times 1,5 = 185 (1 + N)^{10}$$

Analog seperti di atas maka perkembangan yang harus diusahakan bagi modal pribumi adalah sebesar N dan dalam hal ini 0,275 sehingga harus diusahakan percepatan di atas tingkat perkembangan yang normal sebesar 17,5% (0,275 - 0,1).

Secara grafis akan terlihat seperti grafik di bawah ini.

GRAFIK 1V



Dari ketiga contoh di atas maka dapat disimpulkan:

1. Makin cepat kita menginginkan terciptanya perimbangan maka, faktor percepatan yang harus diberikan kepada modal pribumi di atas tingkat perkembangan yang wajar makin besar dan demikian sebaliknya.
2. Makin cepat kita memberi percepatan kepada modal pribumi di atas perkembangan wajar makin kecil faktor percepatan yang harus diusahakan dan demikian sebaliknya.
3. Bila perimbangan yang dimaksudkan adalah modal pribumi harus lebih besar dari modal non pribumi maka makin besar faktor percepatan di atas tingkat perkembangan wajar yang harus diberikan dan demikian sebaliknya.

IV. Faktor Penambah Percepatan

1. Kredit Bank

Bagi perusahaan, kredit bank dapat berguna sebagai alat untuk memperbesar rentabilitas modal sendiri dan bagi perusahaan yang kekurangan modal untuk mengelola sesuatu bidang usaha adanya kredit bank tersebut akan sangat membantu dan bermanfaat. Untuk memberi gambaran bagaimana kredit bank tersebut dapat memperbesar rentabilitas modal sendiri maka di bawah ini diberikan suatu contoh:

Suatu perusahaan dalam keadaan pertama bergerak dengan modal sebesar Rp. 1 juta dan dalam keadaan normal memperoleh keuntungan setelah dipotong pajak sebesar 20% dari besarnya modal. Dalam keadaan selanjutnya perusahaan tersebut dapat memperoleh kredit bank sebesar Rp. 1 juta dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 12%. Dalam keadaan seperti ini perusahaan yang bersangkutan masih dapat mempertahankan rentabilitas perusahaan (setelah dipotong pajak) sebesar 20%. Dengan demikian rentabilitas modal sendiri perusahaan yang bersangkutan akan bertambah besar dan dalam hal ini akan menjadi $\{(20\% \times 2 \text{ juta}) - (12\% \times 1 \text{ juta})\} / 1 \text{ juta} = 28\%$. Dalam hal ini terlihat adanya kenaikan rentabilitas modal sendiri sebesar 8% dibandingkan dengan tingkat sebelumnya.

Bagi suatu perusahaan yang diteropong secara individual, penggunaan kredit bank tersebut akan berpengaruh positif (mempertinggi rentabilitas modal sendiri) sampai batas-batas tertentu. Pengaruh positif ini ditentukan oleh variabel-variabel: besarnya modal sendiri, besarnya kredit bank, besarnya rentabilitas sebelum dan sesudah penggunaan kredit bank dan besarnya tingkat bunga bank. Mengukur besarnya pertambahan rentabilitas modal sendiri sebagai akibat atau pengaruh penggunaan kredit bank ini sangat penting terhadap perusahaan secara individual dalam hubungannya dengan perusahaan-perusahaan secara keseluruhan. Dikatakan penting, karena dengan demikian, pemberian kredit kepada para pengusaha dapat dilaksanakan dengan sistim prioritas yang kriterianya ditentukan oleh besar kecilnya pertambahan rentabilitas modal sendiri perusahaan yang bersangkutan.

Sering terdengar keluhan para pengusaha pribumi yang menyatakan mereka tidak dapat bersaing karena kekurangan modal atau mereka tidak dapat mengelola sesuatu bidang

usaha karena modal tidak mencukupi apa yang dibutuhkan. Bantuan kredit bagi pengusaha yang memang benar-benar kekurangan modal akan sangat bermanfaat baik dipandang dari segi perusahaan itu secara individu maupun dipandang dari segi pengembangan modal secara keseluruhan.

Kebijaksanaan pemerintah yang digariskan pada tanggal 22 Januari 1974 menyatakan pemberian kredit investasi hanya kepada golongan pribumi. Kebijakan ini dapat dikatakan tepat dalam usaha menciptakan percepatan yang lebih besar seperti yang diuraikan di atas. Hanya dalam hal ini perlu ditekankan, pemberian kredit itu harus dilihat dari segi besarnya pengaruh yang diciptakan terhadap perusahaan secara individu dalam hubungannya dengan perusahaan-perusahaan pribumi secara keseluruhan.

2. Pemberian Fasilitas

Pemberian fasilitas kepada pengusaha-pengusaha pribumi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini dapat berbentuk pemberian fasilitas untuk menggarap sesuatu bidang usaha tertentu khusus kepada golongan pribumi, fasilitas di bidang perpajakan dan fasilitas lain-lain.

a. Pemberian Bidang Usaha Tertentu Khusus Bagi Golongan Pribumi

Kebijaksanaan pemerintah tanggal 22 Januari 1974 telah menggariskan adanya negative list bagi Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam usaha mempercepat perkembangan modal pribumi seperti yang diuraikan terdahulu kebijakan ini baik juga bila diterapkan bagi golongan pribumi. Tetapi penerapan kebijakan yang demikian harus menekankan segi keadilan sehingga perlu diadakan pengaturan yang dapat dianggap wajar.

Dari segi usaha menciptakan percepatan modal pribumi harus lebih cepat dari modal non pribumi, penerapan negative list yang dimaksudkan harus didasarkan kepada kriteria besarnya pengharapan laba dari bidang usaha tersebut. Bagi bidang usaha yang akan memberi laba yang lebih besar dari tingkat laba normal (misalnya 20%) dikhususkan bagi pengusaha-pengusaha pribumi.

Kenyataan dalam masyarakat, pengusaha-pengusaha pribumi dapat dikatakan belum mengetahui dan mengenal secara baik bidang usaha yang dapat memberi pengharapan laba yang baik (bandingkan dengan banyaknya permohonan kredit yang ditolak oleh bank) dan belum sanggup melakukan feasibility study secara memuaskan terhadap bidang-bidang usaha yang akan digarap.

Untuk ini ada baiknya pemerintah menyediakan diri melakukan feasibility study sehingga pada gilirannya bidang usaha yang memberi pengharapan laba yang lebih besar dapat ditawarkan kepada pengusaha pribumi sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Harus diakui faktor pengharapan laba bukan satu-satunya faktor atau kriteria dalam penentuan negative list yang dimaksudkan karena keberhasilan untuk mewujudkan pengharapan tersebut juga dipengaruhi banyak faktor-faktor lain umpamanya, besarnya modal yang tersedia, kemampuan manajemen, kontinuitas usaha dan lain sebagainya. Tetapi menekankan faktor tersebut adalah penting dan tidak berlebihan bila dikatakan bahwa faktor ini perlu mendapat perhatian dalam mempercepat perkembangan modal pribumi.

b. Pemberian Fasilitas di bidang Perpajakan

Berbagai macam fasilitas yang dapat diberikan kepada golongan pribumi melalui bidang ini apakah menyangkut pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak perseroan dan lain sebagainya. Pemberian fasilitas perpajakan kepada golongan pribumi dapat merupakan komponen yang dapat mempercepat perkembangan modal mereka. Yang paling menarik dalam hal ini adalah pemberian fasilitas dalam bidang pajak perseroan karena pada dirinya pajak ini akan dikenakan terhadap laba atau hasil usaha dan tidak mempengaruhi jalannya perusahaan dalam proses menciptakan laba. Dengan demikian akibat yang tidak baik dalam dunia perdagangan sedikit banyak dihindarkan.

Pengurangan ataupun penghapusan pajak perseroan bagi pengusaha-pengusaha pribumi yang akan menanankan labanya kembali dalam dunia usaha akan mempercepat perkembangan modal pribumi. Untuk jelasnya diberikan sebuah contoh seperti di bawah ini:

Suatu perusahaan bergerak dengan modal sebesar Rp. 3 juta; laba sebelum dipotong pajak perseroan adalah sebesar Rp. 1 juta; pajak perseroan dimisalkan sebesar 40%. Dengan

demikian laba sesudah dipotong pajak perseroan sebesar Rp. 600.000.- (20% dari besarnya modal). Sesuai dengan asumsi terdahulu bahwa 50% dari laba bebas pajak diperuntukkan untuk ditanam kembali, dalam hal ini jumlahnya adalah sebesar Rp. 300.000,-. Bila pajak perseroan dihapuskan dan jumlah ini diwajibkan ditanam kembali dalam bidang usaha maka dari contoh ini akan terlihat penanaman kembali akan berjumlah Rp. 700.000,- ($400.000 + 300.000$) atau 23,33% dari besarnya modal. Dengan demikian akan terdapat pertambahan percepatan sebesar 13,33% ($23,33 - 10$).

Pemberian fasilitas dalam bidang pajak perseroan ini sudah barang tentu dibatasi oleh efektif tidaknya pengaruh yang timbul karenanya. Bila pemberian fasilitas tersebut akan berakibat penurunan rentabilitas (laba) yang dihasilkan (misalnya sehubungan dengan ekspansi yang dilakukan mulai jenuh), pemberian fasilitas tersebut perlu ditinjau kembali. Dengan demikian dapat dinyatakan untuk maksud ini, diperlukan adanya suatu pedoman yang jelas dan terarah dan kemampuan yang memadai dari para petugas pajak.

Pemberian fasilitas pajak perseroan seperti ini memang jelas akan mengurangi pendapatan negara. Tetapi bila dibandingkan dengan usaha bila pemerintah menyediakan dana seperti halnya yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya yang hanya dapat menciptakan perimbangan "semu", maka tindakan ini akan lebih baik. Tindakan ini akan lebih baik lagi bila dibandingkan akibat yang timbul dari kedua tindakan tersebut. Karena jelas tindakan pemberian fasilitas di bidang pajak perseroan ini lebih menekankan segi keadilan daripada tindakan penyediaan dana untuk membeli saham perusahaan-perusahaan non pribumi (tidak secara sukarela?) yang pada akhirnya dijual kepada golongan pribumi. Alangkah baiknya dalam usaha menciptakan perimbangan kekuatan modal dalam arti yang sebenarnya faktor ini juga mendapat perhatian yang lebih besar.

c. Lain-lain Fasilitas

Banyak fasilitas-fasilitas selain apa yang disebut di atas yang dapat diberikan kepada golongan pribumi untuk tujuan menciptakan perimbangan saham (modal), di antaranya dapat disebutkan: penyediaan lokasi yang baik, promosi barang-barang, pendidikan bagi para pengusaha. Tetapi dalam uraian kali ini sengaja tidak dibahas mengingat sudah banyak para penulis yang sudah mengemukakannya secara baik dan bertujuan sama.

V. Kesimpulan

Dari uraian di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan, bertitik tolak dari kenyataan belum terciptanya perimbangan modal (saham) dalam masyarakat Indonesia khususnya antara golongan pribumi dan non pribumi maka diperlukan adanya suatu usaha yang bertujuan menciptakan perimbangan modal (saham) dalam arti yang sebenarnya. Sehingga dengan demikian penguasaan minoritas atas sebagian besar perekonomian Indonesia yang berakibat demikian buruk dapat dihindarkan. Usaha menciptakan perimbangan yang dimaksudkan dapat dicapai melalui berbagai cara, tetapi yang tidak dapat diabaikan dan dilepaskan usaha itu sendiri harus dilaksanakan menurut cara-cara yang dapat dianggap wajar. Karena kekuatan modal pribumi pada saat sekarang ini berada di bawah kekuatan modal non pribumi, perlu diusahakan agar perkembangan modal pribumi dapat lebih cepat dari perkembangan yang wajar dari modal non pribumi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi faktor percepatan yang lebih besar kepada modal pribumi. Cepat atau lambat perimbangan modal (saham) yang dimaksudkan dapat tercipta tergantung dari besar kecilnya faktor percepatan yang dapat diberikan kepada modal golongan pribumi.

